

OBSERVASI GENDER: COVID-19 DAN KRISIS

Jumlah perempuan dengan COVID-19 di Indonesia per 16 Mei



© 2020 Mapbox © OpenStreetMap

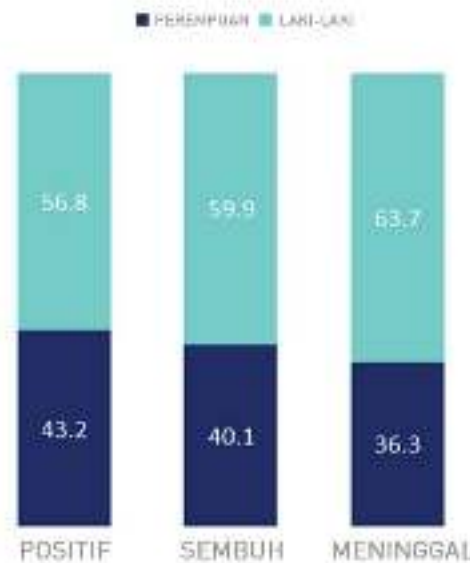
Peta kasus terkonfirmasi per provinsi. Warna yang lebih gelap mengindikasikan lebih banyak kasus terkonfirmasi.

Date: <https://covid19.go.id>

Update Pemantauan: Dampak COVID-19 Berdasarkan Gender

Sejak 16 Mei, sebanyak 7.364 perempuan dan anak perempuan telah terinfeksi COVID-19 di Indonesia, atau 43,2% dari total 17.025 kasus terinfeksi secara nasional. Perempuan juga merupakan 36,3% korban meninggal (1.089) dan 40,1% dari 3.911 korban sembuh secara nasional. Di Jakarta sebagai episenter epidemi nasional ini, 2.776 perempuan dan anak perempuan dinyatakan positif COVID-19, atau 47,2% kasus dari total kasus di DKI Jakarta.

Aceh adalah provinsi yang paling sedikit terdampak, dengan 2 perempuan terbukti positif atau 11,1% dari total 18 kasus.



Editorial

Setiap krisis membawa dampak berbeda bagi laki-laki dan perempuan, dan setiap studi juga mengkonfirmasi hal ini tapi sudah sangat terlambat untuk bertindak. Namun, hal tersebut tidak akan terulang lagi. Indonesia dan para mitra internasional, pemimpin dan masyarakat sipilnya telah memiliki komitmen yang kuat terhadap keadaan gender dalam pembangunan. Memastikan bagaimana setiap program memenuhi kebutuhan perempuan dan mempertimbangkan suara mereka dalam upaya menghadapi dampak ekonomi dan sosial adalah ujian nyata tentang seberapa kuat komitmen tersebut. Nawala ini disusun untuk memastikan bahwa dampak terkait gender dari COVID-19 telah dilangkap, dilaporkan, dan yang terpenting, diindaklanjuti oleh pemerintah dan masyarakat sipil dalam seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menangani pandemi ini.

Ini adalah edisi perdana dari Nawala yang kami rencanakan akan terbit setiap bulan. Nawala ini bertujuan untuk berbagi informasi tentang bagaimana krisis ini berdampak pada perempuan dan bagaimana laki-laki dan perempuan merespon krisis ini. Terbitan ini akan menyajikan statistik pemerintah, hasil dari banyak survei yang sedang berjalan, serta memasukkan cerita-cerita dari para perempuan dan pemerintah daerah yang berada di garis depan penanganan pandemi COVID-19 yang memprioritaskan hak dan intervensi yang sesuai bagi perempuan. Karena ini adalah edisi pertama, kami menyambut setiap masukan, komentar atau kontribusi untuk meningkatkan kualitas edisi-edisi mendatang.

Selamat membaca!

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak sosial, kesehatan dan ekonomi yang serius di seluruh Indonesia, serta memperparah ketimpangan dan membuat perempuan dan anak perempuan menghadapi kerentanan yang unik. Berbagai krisis kesehatan global di masa lalu telah mengajarkan [pentingnya memasukkan analisis gender](#), termasuk pengetahuan dan kepemimpinan perempuan, untuk meningkatkan kualitas intervensi.

Pembagian kerja berdasarkan gender telah menempatkan perempuan di garis depan dalam peperangan melawan COVID-19. Sebanyak 74% dokter dan perawat di Indonesia adalah perempuan. Mereka terpapar infeksi melalui kontak dengan pasien maupun dengan staf medis garis depan lainnya. Meskipun risiko ini semakin meningkat, separuh dari pekerja kesehatan di Indonesia tidak memiliki asuransi kesehatan penuh.

Penutupan sekolah meningkatkan jumlah perempuan yang bekerja tanpa dibayar dan menurunkan keterlibatan mereka di dalam kerja berbayar. Sebanyak 39% perempuan yang bekerja memiliki setidaknya satu anak usia sekolah dasar. Masalah ini khususnya sangat buruk pada rumah tangga yang dikepalai perempuan, yang merupakan salah satu kategori rumah tangga termiskin di Indonesia.

Sebanyak 89.000 pekerja migran telah dipulangkan ke Indonesia, dan jumlah ini akan terus bertambah. Migrant Care mencatat bahwa sekitar 70% pekerja migran adalah perempuan, yang menghadapi kerentanan berlapis, termasuk kehilangan pencaharian dan kemungkinan tidak mendapatkan program kesejahteraan sosial.

Perempuan dan jaring pengaman sosial

Tanpa jaring pengaman sosial, [Bappenas memperkirakan](#) bahwa angka kemiskinan Indonesia dapat mencapai 10,54% atau bertambah 3,63 juta orang pada akhir tahun ini. Karena perempuan adalah mayoritas pekerja



COVID-19 telah membawa '[pandemi bayangan](#)', yaitu kekerasan berbasis gender. Untuk itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memperingatkan bahwa wabah ini [akan mengakibatkan](#) peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Jawaban

Perempuan juga berada di posisi yang unik untuk merespon secara langsung dan efektif terhadap krisis ini. Di seluruh Indonesia, jaringan kelompok perempuan, seperti Kelompok Konstituen [BaKTI](#), Sekolah Perempuan [KAPAL Perempuan](#) dan Serikat [PEKKA](#) berada di posisi strategis untuk mengawasi berbagai program dan respon kebijakan. Jaringan-jaringan ini memiliki struktur yang mapan serta jangkauan luas ke masyarakat akar rumput. Banyak dari jaringan ini telah memimpin penanggulangan yang terlokalisasi secara efektif dan memberdayakan masyarakat setempat. Mereka juga merupakan sumber informasi yang baik tentang ketimpangan khas di tingkat lokal dalam hal penjangkauan perlindungan sosial.

di sektor yang paling banyak terdampak COVID-19 dan semakin rentan terhadap kemiskinan, maka sangat penting untuk melibatkan dan menysasar perempuan dalam berbagai kebijakan perlindungan sosial.

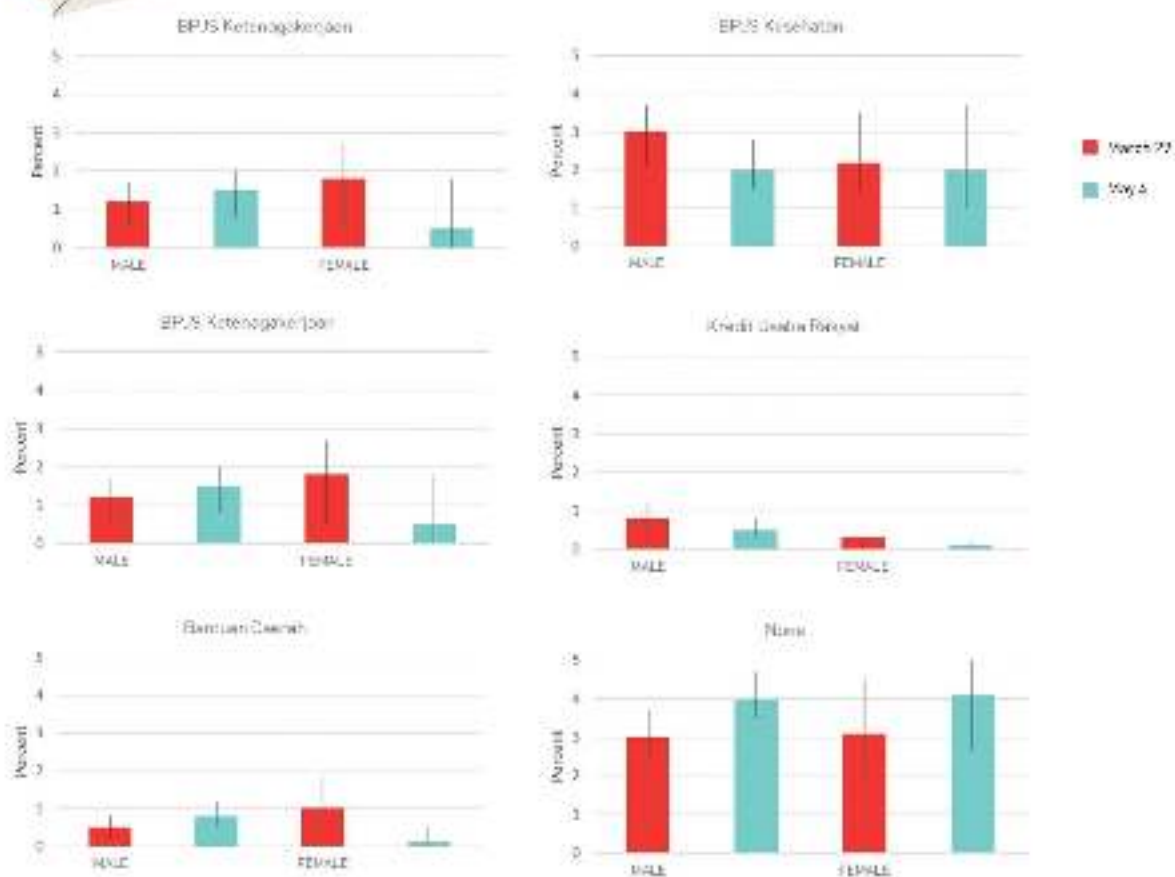
Pemerintah telah merespon pandemi ini dengan [berbagai program perlindungan sosial](#) yang

ditingkatkan, yang meningkatkan jumlah penerima manfaat maupun nilai manfaat. Upaya tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Manfaat Kartu Prakerja juga semakin ditingkatkan, dengan anggaran dilipatgandakan menjadi Rp20 triliun selama empat bulan terakhir. Rumah tangga yang tidak mendapatkan manfaat PKH atau Kartu Sembako juga disasar: di perkotaan, 1,9 juta rumah tangga akan menerima bantuan pangan dari program Bantuan Presiden dan 9 juta rumah tangga di luar perkotaan akan menerima bantuan tunai sebesar Rp600.000 per bulan. BLT Dana Desa akan membantu 10-12 juta rumah tangga yang belum terdaftar di basis data kesejahteraan sosial, sementara listrik gratis atau bersubsidi akan diberikan kepada 31 juta rumah tangga berpendapatan rendah selama 3 bulan.

Penting sekali untuk terus memantau pelaksanaan perluasan program ini untuk mengidentifikasi dimensi gender dari setiap eksklusi tak disengaja dalam penyasaran, serta mengidentifikasi hambatan administratif terhadap akses perempuan kepada program. Hal ini khususnya relevan bagi kelompok-kelompok rentan seperti rumah tangga yang dikepalai perempuan, yang merupakan salah satu kategori keluarga termiskin di Indonesia. Hingga saat ini, tidak ada data terpilah gender yang telah dipublikasikan untuk setiap program tersebut.



Pemanfaatan program perlindungan sosial pemerintah oleh masyarakat yang tidak bekerja



- Di seluruh minggu, hanya 25% laki-laki dan 23% perempuan yang tidak bekerja yang menerima BPNT/Sembako atau PKH.
- Pemanfaatan program pemerintah oleh masyarakat yang saat ini tidak bekerja tetap sama di seluruh minggu.

Sumber: [JPM -SES](#) survei online terhadap 800 responden

Studi tentang COVID-19 dan gender yang saat ini masih berlangsung:

Komnas Perempuan: menurvei kekerasan berbasis gender dan respons kebijakan terhadap pandemi.

MAMPU: melaksanakan survei via telepon tentang dampak virus terkait gender di Indonesia.

Investing in Women dan **the Indonesian Business Coalition for Women's Empowerment (IBCWEI):** menurvei anggota perempuan Business Coalitions terkait dampak ekonomi COVID-19 dan tantangan dan kekhawatiran yang dialami para karyawannya.

PEKKA: menyiapkan survei terhadap para anggota di seluruh Indonesia, dengan bertokus pada akses kepada program pemerintah dan status ekonomi.

Bank Dunia bersama dengan **Kementerian Desa:** melaksanakan survei mingguan, bulanan, dan triwulanan kepada para kepala desa. Informasi yang dicakup: kesehatan dan migrasi (mingguan), kesejahteraan ekonomi, keamanan pangan (bulanan), kohesi sosial dan akses kepada program sosial (triwulanan). Informasi akan dipantau secara real-time.

JPAL-SEA: melakukan survei online dwimingguan untuk memahami dampak ekonomi COVID-19 di Indonesia (lihat ringkasan di bawah).

Survei dalam sorotan:

Sebuah Survei Online tentang Dampak Ekonomi COVID-19 di Indonesia (Online Survey on the Economic Impact of COVID-19 in Indonesia) saat ini sedang dilaksanakan oleh **Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Southeast Asia (J-PAL SEA)**. Temuan awal meliputi periode 6 minggu dari 29 Maret hingga 4 Mei dan mengidentifikasi dampak kunci COVID-19 terhadap 500 orang Indonesia, termasuk:

Lapangan Kerja: terjadi peningkatan pengangguran di kalangan laki-laki dan perempuan dari minggu ke-1 hingga minggu ke-6. Sebanyak 6,56% laki-laki dan 58% perempuan yang sebelumnya bekerja kini tidak lagi bekerja. Kehilangan pekerjaan terjadi di seluruh sektor.

Keamanan Pangan: Sebanyak 45% rumah tangga (namun dengan persentase lebih tinggi pada perempuan) melaporkan "seringkali" makan kurang dari biasanya akibat kurang uang, dengan 77% laki-laki dan perempuan makan dalam jumlah kurang dari biasanya.

Migration: 38% laki-laki dan 34% perempuan dilaporkan berpindah lokasi sejak krisis dimulai. Migrasi terjadi di perkotaan dan perdesaan. Di industri perhotelan, 57% laki-laki dan 78% perempuan telah mengalami relokasi.

Pemanfaatan program bantuan pemerintah

oleh mereka yang tidak bekerja masih rendah di sepanjang periode survei, dengan 25% laki-laki dan 23% perempuan telah dicakup oleh BPNT/Sembako atau PKH. 62% laki-laki dan 58% perempuan menerima setidaknya satu program pemerintah sejak awal pandemi.

Untuk informasi tentang survei J-PAL, hubungi Cecily Whya di: ceciw@overseaslab.org


Kabupaten dalam fokus: Kabupaten Kubu Raya



Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di bawah kepemimpinan Muda Mahendrawan, telah melaksanakan respons sensitif gender terhadap COVID-19 yang meliputi berbagai program dan kebijakan progresif, termasuk:

- Menstimulasi ekonomi rumah tangga dengan menugaskan perempuan untuk menjahit masker kain, kemudian membeli dan menyumbangkannya kepada masyarakat. Lebih dari 70.000 masker yang dibuat oleh perempuan setempat dibeli oleh Pemkab dengan harga Rp4000 per lembar, sehingga secara bersamaan memberikan pemberdayaan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari COVID-19.
- Membeli beras produksi petani lokal dan menyalurkannya kepada masyarakat terdampak untuk memastikan keamanan pangan, menstabilkan harga, dan memberi manfaat bagi banyak anggota PEKKA yang merupakan petani.
- Mengembangkan program bantuan khusus bagi perempuan miskin kepala rumah tangga dan penyandang disabilitas.
- Memberikan insentif tambahan bagi personil medis dan menginstruksikan para bidan untuk melakukan kunjungan rumah bagi ibu hamil; dan
- Melibatkan perempuan dalam Gugus Tugas COVID-19 setempat. Para anggota Gugus Tugas ini mendistribusikan masker, mengedukasi masyarakat, dan mensanitasi fasilitas umum.

Oleh: Fasilitas Lapangan PERKA Kalimantan Barat, Khuliah, dan Direktur PEKKA, Nani Lumnani



Nomor bantuan (helpline) dan tautan:

- Lihat data COVID-19 resmi dari Pemerintah Indonesia: <https://covid19.go.id/>
- Hotline Darurat COVID-19 Kementerian Kesehatan: 119.
- Laporkan masalah terkait distribusi bantuan sosial melalui layanan pengaduan Kementerian Sosial: WhatsApp: 0811 10 222 10, Website: bansosocovid19@kemsos.go.id,
- Untuk konsultasi terkait kekerasan terhadap perempuan, hubungi Komnas Perempuan di: +62-21-3903963
- Untuk melaporkan isu-isu terkait distribusi BLT Dana Desa, kunjungi: <http://e-complaint.kemendes.go.id/>


Pandangan dari Misiyah, Direktur KAPAL Perempuan

Misiyah adalah Direktur KAPAL Perempuan, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk pemberdayaan perempuan dan mengembangkan kepemimpinan perempuan, termasuk melalui pembentukan Sekolah Perempuan informal di seluruh Indonesia. Misiyah menjelaskan bahwa sejak wabah COVID-19 bermula, KAPAL Perempuan telah mengubah fokus kegiatannya menjadi tanggap darurat, sebagaimana yang pernah dilakukan pada pasca-tsunami di Aceh dan gempa bumi baru-baru ini di Lombok.

Menurut Misiyah: "KAPAL Perempuan menyesuaikan pendekatannya di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat". Di sejumlah wilayah terpencil, misalnya, keamanan pangan dan bantuan untuk sekolah anak adalah beberapa contoh masalah yang sangat mendesak. "Di Kupang, Sekolah Perempuan setempat didorong untuk menjadi bagian dari Gugus Tugas COVID-19 daerah, untuk mengadvokasi respons sensitif gender. Di Gresik,

KAPAL mengumpulkan data online, yang kemudian digunakan oleh pemerintah kabupaten. Sementara itu di Lombok, KAPAL menekankan pentingnya keamanan pangan dan kemandirian, termasuk dengan memberikan bibit sayuran dan alat-alat berkebun kepada perempuan."

Misiyah menekankan pentingnya perspektif gender. Ia menjelaskan bahwa pandemi ini berdampak pada semua orang, namun perempuan mengalami kerentanan yang unik dan berlapis, seperti KDRT, kerja tak dibayar, dan terganggunya akses kepada perawatan pra dan pasca-melahirkan. Ia juga menjelaskan bagaimana KPPPA pada awalnya tidak dilibatkan di dalam Gugus Tugas COVID-19 nasional, namun saat ini sudah menjadi anggotanya. KPPPA berhasil mendorong diterbitkannya data pemerintah terpilah gender dan telah memberikan bantuan darurat yang menasar perempuan hamil, bayi, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Selain itu, KPPPA juga telah meluncurkan layanan konseling dan menerbitkan panduan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi.



Ikuti selalu kabar terbaru dari Program MAMPU dan berikan masukan, komentar, atau ide kolaborasi Anda ke: info@mampu.or.id

Nawala ini adalah hasil kerja sama antara program-program pembangunan internasional yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan di Indonesia. Publikasi bulanan ini mengumpulkan dan menyajikan informasi tentang bagaimana krisis dan upaya mitigasi berdampak pada perempuan Indonesia, dengan tujuan untuk mendorong program dan kebijakan responsif-gender.